

BIODATA PENULIS

Putu Eva Ditayani Antari, dilahirkan di Denpasar pada 11 September 1989. Penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Lalu memperoleh gelar Magister Hukum pada tahun 2014 dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Udayana. Saat ini penulis sedang menempuh studi doctoral pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya dan fokus pada bidang penelitian mengenai perundang-undangan. Menyelesaikan Sarjana Hukum Islam (Syariah) di Fakultas Syariah UINSU, Medan, 1998. Penulis berprofesi sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) sejak tahun 2015. Penulis memiliki riwayat publikasi pada jurnal Internasional terindeks Scopus dengan judul “*A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence Against Children in Indonesian Laws*” yang dipublikasikan pada Januari 2021. Penulis dapat dihubungi melalui email evaditayaniantari@undiknas.ac.id atau melalui alamat kampus Undiknas Jalan Bedugul No. 39 Denpasar-Bali.

Shofia Trianing Indarti, dilahirkan di Ngawi, 28 Juni 1991. Menyelesaikan studi Sarjana Sastra Asia Barat di Fakultas Ilmu Budaya, UGM dan melanjutkan studi Magister Ilmu Linguistik di Fakultas Ilmu Budaya, UGM. Saat ini penulis bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya sejak tahun 2017 sebagai Analis Keimigrasian Pertama. Penulis sampai saat ini masih aktif menulis terutama terkait dengan keimigrasian baik dalam bentuk jurnal maupun artikel keimigrasian. Alamat: Jl Raya By pass Juanda KM 3-4, Sedati, Sidoarjo. E-mail: shofia.trianing@mail.ugm.ac.id.

Muwaffiq Jufri, dilahirkan di Pamekasan Madura pada tanggal 26 September 1991. Pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan di Pondok Pesantren Matsaratul Huda Pamekasan. Kemudian melanjutkan pendidikan kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM), lulus tahun 2013. Sedangkan pendidikan masternya diselesaikan pada Jurusan Hukum Kenegaraan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2016. Saat ini menjadi tenaga pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, setelah sebelumnya mengabdikan diri sebagai pengajar di Universitas Islam Madura. Penulis juga tercatat sebagai Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (LPBH PCNU) Pamekasan. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah, antara lain: Jurnal Konstitusi, Jurnal Yudisial, Jurnal Recthsvinding, Jurnal Al-Ihkam, dan lain sebagainya. Kritik dan saran dapat disampaikan pada alamat e-mail: muwaffiq.jufri@gmail.com.

Simson Kristianto Putra Pasaribu, dilahirkan di Takengon, 17 Desember 1992, menyelesaikan pendidikan Sarjana Psikologi di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015. Saat ini aktif bekerja sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, tepatnya pada pos Bapas Sibolga di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Siborongborong. Bidang penelitian yang diminati berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dan anak yang berhadapan dengan hukum. Alamat: Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Siborongborong, Jl. Siliwangi, Desa Silaitlait, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, email: simsonkristianto@gmail.com.

Agus Suntoro, dilahirkan di Kebumen, Jawa Tengah pada 30 November 1981. Menempuh pendidikan Sarjana di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya, Jakarta. Sejak 2008 sampai 2019 bekerja di Komnas HAM RI sebagai penyelidik pelanggaran HAM. Mulai 2019 berpindah dan menekuni bidang penelitian, beberapa penelitian yang dipimpinnya diantaranya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia, penyadapan dalam kerangka pembaruan hukum, kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemilu dan pilkada serentak di Indonesia, serta terorisme. Beberapa karya telah diterbitkan dalam berbagai Jurnal diantaranya Jurnal HAM, Jurnal Legislasi, Jurnal Hukum dan

Peradilan, Jurnal Negara Hukum, Jurnal Ar Risalah dan Jurnal Bhumi. Selain itu, juga berkontribusi pada beberapa konferensi dan *book chapter* yang diterbitkan beberapa lembaga. Untuk korespondensi dapat dihubungi melalui agussuntoro08@gmail.com atau sunthoro@yahoo.com.

Taufik H. Simatupang, dilahirkan di Sibolga Sumatera Utara 21 Maret 1973. Menyelesaikan Sarjana Hukum dari Universitas Islam Sumatera Utara (1996) dan Magister Hukum Universitas Indonesia (2003). Bekerja pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dengan jabatan Peneliti Madya, Pangkat/Golongan Pembina Tk I (IV/b). Menulis di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Jurnal Ilmiah Lex Jurnalica dan Forum Ilmiah Universitas INDONUSA Esa Unggul. Menulis buku berjudul *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen* Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2004. Dosen Luar Biasa Program Studi Ilmu Komunikasi Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (2006-2009), Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah (2005-sekarang) dan Fakultas Hukum Universitas Marsekal Dirgantara Suryadarma (2004-sekarang). Pernah terlibat dalam kegiatan penelitian di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketua Tim Penelitian Tentang Kewarganegaraan di Kinabalu dan Sabah Malaysia (2012). Anggota Tim Penelitian Tentang Keimigrasian di Sidney Australia (2013).

M. Beni Kurniawan, S. Sy, M.H. dilahirkan di Pariaman, 15 September 1992. Menyelesaikan Strata 1 sebagai wisudawan terbaik di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014) dan Magister Hukum Konsentrasi Hukum Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2018). Saat ini bekerja sebagai praktisi hukum. Penulis aktif menulis, meneliti dan mengikuti workshop hukum terkait isu hukum, peradilan dan hak asasi manusia. Beberapa tulisan penulis sudah diterbitkan dalam Jurnal HAM Vol. 8 Nomor 1 Tahun 2017, Jurnal Kebijakan Hukum Vol 11. No. 3 Tahun 2017. Jurnal Yudisial Vol. 11. Nomor 1 Tahun 2018, Jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 3 Tahun 2018, Jurnal Cita Hukum Vol. 6 No.2 Tahun 2018. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No.2 Juni 2018. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.9 No.1 tahun 2020. Alamat e-mail: benieluciha92@gmail.com.

Fauziah Rasad, dilahirkan di Jakarta 31 Januari 1981, bekerja sebagai Peneliti Ahli Pertama di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menamatkan pendidikan Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2004, kemudian menyelesaikan Strata Dua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada 2009; Alamat: Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat; email: fauziahrasad@gmail.com.

Tony Yuri Rahmanto, dilahirkan di Jakarta 9 September 1986; bekerja di Kementerian Hukum dan HAM sebagai Fungsional Peneliti Pertama Bidang Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; Memulai karier sebagai PNS pada tahun 2009; Riwayat pendidikan menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Trisakti - Jakarta, dan pendidikan S2 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Program Konsentrasi Hukum Bisnis; Alamat, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telp. (021) 2525015 Ext. 518. HP. 081905093663. E-mail: tonyscooterist@gmail.com.

Oki Wahyu Budijanto, dilahirkan di Jakarta pada 27 Oktober 1976. Bekerja di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Fungsional Peneliti Ahli Madya Bidang Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (selesai tahun 2001), kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (selesai tahun 2007). Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama LIPI (2003), Pendidikan dan Pelatihan Metodologi Penelitian LIPI (2004) serta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan LIPI (2016). Pendidikan dan Pelatihan Struktural: Diklat Kepemimpinan Tk. IV (2009) dan Diklat Kepemimpinan Tk. III (2013). Di samping itu, pernah mengikuti Human Rights Training for Indonesia Agencies di New Zealand (2007). Pengalaman menjadi Narasumber pada acara sosialisasi

di beberapa daerah: Kabupaten Jember dan Kabupaten Semarang (terkait dengan Evaluasi Efektivitas Forum Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaandan Kepolisian dalam Kerangka Integrated Criminal Justice System) serta Kabupaten Tarutung, Kabupaten Lebak, Kabupaten Klungkung (terkait dengan Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan Terkait Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin).

Dr. Jayadi Damanik, S.P., M.Si., S.H. lahir di Pematangsiantar, 20 Nopember 1967. Menyelesaikan S-3 Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada tahun 2007. Pengalaman pekerjaan sebagai Pengajar Universitas Nasional di Jakarta (2007-hingga kini); Komnas HAM di Jakarta (2007-hingga kini); Tutor Tutorial Online Universitas Terbuka (2015 – hingga kini); Tim Perumus Hasil Eksaminasi Publik terhadap Putusan Mahkamah Agung No.16 P/HUM/2006 dan No.26 P/HUM/2007 tentang Permohonan Judicial Review atas Perda Kota Tangerang dan Kabupaten Bantul tentang Pelarangan Pelacuran (2013-2014) yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan – Komisi Yudisial RI (2013-2014); Peneliti pada proyek “Evaluasi Efektivitas Integrated Criminal Justice System di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Badan Litbang HAM Kementerian Hukum dan HAM RI (2013); Peneliti pada Kantor Hukum “Justice Initiative” di Bandung (2008-2013); Pengajar pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat DPC PERADI Bandung (2010); Anggota Tim Pemantauan Dugaan Pelanggaran HAM oleh PT. Free Port (2007); Koordinator Tim Peneliti Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan dalam Instrumen Internasional HAM, Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Realisasinya di Indonesia oleh Komnas HAM (2005); Sekretaris Tim Ad Hoc Penyelidik Dugaan Pelanggaran HAM yang berat dalam kasus Wasior dan Wamena di Papua (2004); Anggota Tim Pengkajian TAP MPR/S 1960-2002 yang dibentuk oleh Komnas HAM (2003); Anggota Tim Inti penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2004-2009; Peneliti Tamu di Technology and Development Group of the Faculty of Business Administration, University of Twente, Belanda (1994); Bekerja di sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (1989-1997). Pengalaman sebagai tenaga ahli di Pengadilan, antara lain: Ahli di Pengadilan Negeri Pandeglang dalam perkara pidana (Pasal 156A KUHP dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE) dengan Terdakwa Sdr. Alnody Bahari pada tanggal 22 Maret 2018; Ahli dalam perkara pidana (Pasal 372 dan/atau 385 KUHP) pada Tahap Penyidikan di Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Nopember 2017 dengan Terlapor Suryawan Sentosa, dkk.; Ahli di Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara perdata Nomor: 52/Pdt.G/2017/PN.Bgr. pada tanggal 24 Oktober 2017; Ahli di Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dengan Perkara No.56/PUU-XV/2017 pada tanggal 23 Oktober 2017; Ahli di Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Judicial Review Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dengan Perkara No.46/PUU-XIV/2016 pada tanggal 1 Februari 2017; Ahli di Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara perdata Nomor: 43/Pdt.G/2016/PN.Bgr. pada tanggal 2 Nopember 2016; Ahli di PTUN Jakarta dalam Sengketa No.117/G/2016/PTUN.JKT pada 22 September 2016; Ahli di Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Judicial Review Undang-Undang tentang MD3 pada tanggal 9 Oktober 2014 dengan Perkara No.83/PUU-XII/2014; Ahli di Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata No.512/Pdt.G/2013/PN.TNG. (Perbuatan Melanggar Hukum) pada tanggal 24 Juli 2014; Ahli dalam perkara pidana (Pasal 156a KUHP) pada Tahap Penyidikan di Polres Kabupaten Bogor pada tanggal 7 Juli 2014 dengan Tersangka JRW yang menikah dengan AZ.; Ahli di PTUN Bandung dalam Sengketa No.70/G/2013/PTUN-BDG pada tanggal 3 Oktober 2013; Ahli di PTUN Bandung dalam Sengketa No.56/G/2013/PTUN-BDG pada tanggal 3 Oktober 2013; Ahli di Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Pidana (Pasal 480 KUHP) dengan Terdakwa Iwan bin Manap pada tanggal 21 April 2009; Ahli di Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Judicial Review Undang-Undang tentang Penanaman Modal dengan Perkara No.21/PUU-V/2007 dan No.22/PUU-V/2007 pada tanggal 5 Desember 2007; Ahli di Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Judicial Review Pasal 154 dan Pasal 156 KUHP dengan Perkara No.6/PUU-V/2007 pada tanggal 17 Juli 2007; Ahli di Pengadilan Negeri Serang dalam perkara perdata (Perbuatan Melanggar Hukum) pada tanggal 24 Mei 2007.

Nicken Sarwo Rini, S.H., M.H. lahir di Padang, 3 April 1981. Meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana 2005. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya 2021. Penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2006 di Kementerian Hukum dan HAM dan memulai karir sebagai peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM 2013. Alamat kantor Jalan HR. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Alamat e-mail: [HYPERLINK "mailto:nicken.sarwo.rini@gmail.com"](mailto:nicken.sarwo.rini@gmail.com) nicken.sarwo.rini@gmail.com. Pengalaman pekerjaan: Ketua Penelitian Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Pelestarian Seni Tradisional Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat Tahun 2014; Ketua Penelitian Peran Negara Terhadap Tanggungjawab Bisnis Perusahaan Tambang Dalam Penghormatan HAM Tahun 2015; Ketua Penelitian Prinsip Non Diskriminasi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2016; Ketua Penelitian Analisis Dampak HAM Terhadap Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Tahun 2017; Ketua Penelitian Penyusunan Indikator Bisnis dan HAM: Studi Baseline tentang Relasi antara Bisnis sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Pariwisata Tahun 2018; Tim Penyusun Buku Pedoman Panduan Umum Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Tahun 2018; Ketua Penelitian Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2019; Ketua Penelitian Realisasi Hak Kesehatan Sebagai HAM Dimasa Pandemi Covid-19 Sebagai wujud Komitmen Pemerintah Mengimplementasikan Ketentuan Dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 2021. Pengalaman menjadi narasumber pada kegiatan: Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan HAM yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin" di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015; Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan HAM yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin" di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015; Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan HAM yang berjudul "Implementasi Peran Negara Terhadap Bisnis Perusahaan Tambang Dalam Sudut Pandang HAM" di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016; Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan HAM yang berjudul "Peran Negara Terhadap Bisnis Perusahaan Tambang" di Kabupaten Lumajang Tahun 2016; Stakeholder Meeting Pemanfaatan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM yang berjudul "Pemantauan dan Pengawasan Pilkada Melalui Perlibatan Masyarakat" di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017; Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan HAM yang berjudul "Perlibatan Masyarakat Melalui Pemantauan Pilkada" di Provinsi Lampung Tahun 2017; Fasilitasi Melaksanakan Pengembangan Hasil Penelitian dan Pengembangan HAM yang berjudul "Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Hak Pendidikan dan Kesehatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017; Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan HAM yang berjudul "Analisis Dampak HAM Terhadap RUU Minerba" di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018; Desiminasi dan Jaringan Masukan Daerah mengenai Panduan Umum Bisnis dan HAM yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI di Palangka Raya Pada tanggal 23 Mei 2019; Sosialisasi Penelitian Corporate University Sebagai Organisasi Pembelajar Di Kementerian Hukum dan HAM yang diadakan di Jambi, Palu, dan Papua Barat (2020); sosialisasi pada kegiatan Opini tentang Ekspektasi Pemangku Kepentingan & Rezim Kekayaan Intelektual: Pendekatan Hukum Responsif di Jawa Timur (2021).